Penerapan Pendekatan Terpadu dalam Perencanaan Program Pendidikan Sekolah di SMA Negeri 1 Gowa

Nurul Afifah*[1], Jumrah[2], Liza Dwi Eftiza Khairunniza[3], Supriadi Torro[4]
Universitas Negeri Makassar[1-4]
e-mail: nurul1806afifah@gmail.com[1], jumr4ah197@gmail.com[2], Lizadwi.eftiza@unm.ac.id[3], supriaditorro@unm.ac.id[4]

ABSTRAK

Perencanaan program merupakan dasar bagi sekolah dalam menentukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Perencanaan yang baik tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan kebutuhan sekolah, visi dan misi, sumber daya, anggaran, pembagian tugas, serta monitoring dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan pendekatan terpadu dalam perencanaan program pendidikan di SMA Negeri 1 Gowa. Penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara semiterstruktur kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sebagai informan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Perencanaan dilakukan melalui rapat kerja pada awal tahun ajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah, masukan para pemangku kepentingan, serta visi dan misi. Program disusun oleh bidang kurikulum, diajukan kepada kepala sekolah, lalu dibahas dalam rapat. Penganggaran mengikuti petunjuk teknis dana BOS melalui ARKAS, prioritas mengacu pada RKT dan RKJM, dan pembagian tugas ditetapkan melalui SK. Monitoring dilakukan kepala sekolah dan unsur pimpinan, sedangkan evaluasi dilakukan melalui diskusi kecil dan umpan balik siswa melalui Google Form. Keterpaduan tampak kuat pada tahap perencanaan, penganggaran, dan pembagian tugas, tetapi masih perlu diperkuat pada monitoring-evaluasi dan umpan balik guru. Kendala utama adalah ketidaksesuaian rencana program dengan anggaran.

Kata kunci : *Pendekatan Terpadu; Perencanaan Program; Manajemen Berbasis Sekolah; SMA Negeri 1 Gowa.*

ABSTRACT

Program planning provides the basis for schools to determine activities that match the needs of the educational unit. Effective planning is connected to school needs, vision and mission, resources, budgeting, task distribution, monitoring, and evaluation. This study aimed to describe the implementation of an integrated approach in educational program planning at SMA Negeri 1 Gowa. A descriptive qualitative design was used, with a semi-structured interview with the Vice Principal for Curriculum as the informant. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. Planning is carried out in work meetings at the beginning of the academic year by considering school needs, stakeholder input, and the school's vision and mission. Programs are drafted by the curriculum division, submitted to the principal, and discussed in meetings. Budgeting follows the BOS technical guidelines through ARKAS, priorities refer to the annual and medium-term work plans, and tasks are assigned through official decrees. Monitoring is conducted by the principal and school leaders, while evaluation takes the form of small discussions and student feedback via Google Forms. Integration is strong in planning, budgeting, and task distribution, but monitoring-evaluation and teacher feedback need strengthening. The main obstacle is the mismatch between planned programs and available budget.

Keywords **:** *Integrated Approach; Program Planning; School-Based Management; SMA Negeri 1 Gowa.*

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan dasar bagi sekolah dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Standar pengelolaan pendidikan digunakan sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam mengelola potensi dan sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien (Kemendikdasmen, 2025). Dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS), sekolah diberi kewenangan untuk menyusun program sesuai kebutuhannya dengan menekankan otonomi dan partisipasi warga sekolah (Mulyasa, 2012). Perencanaan

program sekolah juga perlu memperhatikan kebutuhan warga sekolah, perubahan kondisi, data, serta anggaran (Kemalasari et al., 2024).

Dalam teori manajemen, perencanaan merupakan fungsi awal yang kemudian diikuti pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Fattah, 2004). Keempat fungsi ini membentuk siklus, sebagaimana tergambar dalam siklus *Plan-Do-Check-Act* yang menempatkan hasil evaluasi sebagai masukan bagi perbaikan perencanaan berikutnya (Deming, 1986). Artinya, perencanaan yang baik perlu dilihat bersama tahap-tahap setelahnya, bukan sebagai kegiatan penyusunan dokumen semata.

Pendekatan terpadu dalam penelitian ini dipahami melalui perspektif pendekatan sistem. Teori sistem memandang suatu keseluruhan sebagai kumpulan komponen yang saling berhubungan dan saling memengaruhi (Von Bertalanffy, 1968). Jika sekolah dipandang sebagai sistem, kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta anggaran adalah komponen yang perlu direncanakan secara bersama. Dengan demikian, dalam penelitian ini pendekatan terpadu didefinisikan secara operasional sebagai upaya menghubungkan kebutuhan sekolah, pihak yang terlibat, visi dan misi, sumber daya dan anggaran, pembagian tugas, serta monitoring dan evaluasi dalam satu rangkaian perencanaan.

Sejumlah penelitian terdahulu relevan dengan hal tersebut. Hastuti et al. (2024) menemukan bahwa rencana strategis dan operasional di SMP Negeri 33 Makassar disusun melalui rapat bersama yang melibatkan guru, staf, dan komponen sekolah lainnya. Winata (2024) menunjukkan keterkaitan antara perencanaan program sekolah dan pencapaian visi misi di SMAN 2 Mendoyo. Rostini et al. (2023) melaporkan bahwa perencanaan MBS di sebuah SMA di Kabupaten Bandung dilakukan melalui rapat bersama seluruh warga sekolah dan pelaksanaannya berpedoman pada RKAS. Torro (2018) menemukan bahwa capaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten Soppeng berbeda antarkecamatan dan antarkategori, yaitu sarana prasarana, sumber daya manusia, dan dukungan operasional. Temuan ini menunjukkan bahwa kesiapan sekolah dalam memenuhi standar tidak merata, sehingga perencanaan di tingkat satuan pendidikan perlu memperhatikan kondisi dan sumber daya masing-masing. Namun, sepanjang penelusuran penulis, kajian-kajian tersebut belum secara khusus menelaah keterpaduan perencanaan sepanjang siklusnya, dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi, dari sudut pandang pengelola bidang kurikulum.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan pendekatan terpadu dalam perencanaan program pendidikan di SMA Negeri 1 Gowa, meliputi proses perencanaan, keterlibatan pihak sekolah, penyelarasan dengan visi dan misi, pengelolaan sumber daya dan anggaran, penentuan prioritas, pembagian tugas, monitoring dan evaluasi, serta kendala dan upaya mengatasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai penerapan pendekatan terpadu dalam perencanaan program pendidikan (Sugiyono, 2019). Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gowa pada 30 September 2026.



Gambar 1. Lokasi Penelitian di SMA Negeri 1 Gowa

Informan penelitian adalah Nur Ilmi, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Informan dipilih secara purposif karena terlibat langsung dalam penyusunan dan koordinasi program sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur menggunakan pedoman yang terdiri dari 20 butir pertanyaan dalam lima kelompok aspek (Tabel 1). Satu butir pertanyaan mengenai forum integrasi program tidak diajukan secara terpisah, tetapi informasi terkait diperoleh dari jawaban atas pertanyaan sebelumnya yang menyebut rapat sebagai forum pembahasan.

Tabel 1. Kisi-kisi Pedoman Wawancara

Aspek	Fokus Pertanyaan	Butir
A. Pemahaman dan perencanaan program	Proses, pertimbangan, identifikasi kebutuhan, pihak terlibat, pembagian peran	1–5
B. Penerapan pendekatan terpadu	Keterhubungan program, koordinasi, pertimbangan komponen sekolah, integrasi kurikulum, forum integrasi	6–10
C. Pelaksanaan perencanaan	Penuangan ke program kerja, prioritas, pembagian tugas, pemahaman peran	11–14
D. Monitoring dan evaluasi	Monitoring, evaluasi keberhasilan, tindak lanjut hasil evaluasi	15–17
E. Kendala dan upaya	Kendala, upaya mengatasi, hal yang perlu ditingkatkan	18–20



Gambar 2. Proses Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yaitu reduksi data (memilah dan mengelompokkan jawaban berdasarkan aspek), penyajian data (uraian naratif dan tabel), serta penarikan kesimpulan. Keterbatasan penelitian ini adalah data bersumber dari satu informan sehingga mencerminkan perspektif pengelola kurikulum dan belum memuat pandangan kepala sekolah, guru, maupun peserta didik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Berbasis Kebutuhan Sekolah melalui Rapat Kerja

Perencanaan program di SMA Negeri 1 Gowa dilakukan melalui rapat kerja setiap tahun ajaran baru. Informan menyatakan bahwa kondisi satuan pendidikan dan kebutuhan sekolah menjadi bahan pembahasan dalam rapat tersebut, termasuk evaluasi terhadap masalah yang ada. Dalam rapat ini, sekolah menerima masukan dari guru, tenaga pendidik, dan pemangku kepentingan lainnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa tahap awal perencanaan berangkat dari kondisi aktual sekolah, bukan hanya melanjutkan program tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan Kemalasari et al. (2024) yang menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan warga sekolah dan perubahan kondisi dalam perencanaan program. Dari sisi MBS, rapat kerja menjadi wadah partisipasi (Mulyasa, 2012), dan pola serupa ditemukan oleh Rostini et al. (2023) serta Hastuti et al. (2024). Meskipun demikian, informan tidak menjelaskan instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan (misalnya angket atau analisis data), sehingga kebutuhan tampaknya dihimpun terutama melalui masukan dalam rapat.

2. Pelibatan Pihak dan Alur Koordinasi

Menurut informan, program disusun oleh bidang kurikulum, diajukan kepada kepala sekolah, kemudian dirapatkan. Seluruh pihak berperan dengan memberikan saran terhadap program yang akan dilaksanakan. Koordinasi pun mengikuti alur yang sama: dibicarakan di bidang kurikulum, kepala sekolah, lalu forum rapat. Keterlibatan berbagai komponen sekolah, orang tua, dan lembaga pemerintah juga ditemukan sebagai faktor pendukung pelaksanaan program sekolah ramah anak di SMP di Takalar (Torro et al., 2019). Temuan ini sejalan dengan pola partisipatif dalam perencanaan di SMA Negeri 1 Gowa.

Alur ini memperlihatkan dua sisi. Pertama, ada unsur partisipatif karena keputusan diambil melalui forum bersama. Kedua, ada unsur hierarkis karena draf dikonsolidasikan oleh bidang kurikulum dan disetujui kepala sekolah. Perpaduan ini membuat arus informasi lebih teratur, tetapi efektivitas partisipasinya bergantung pada kualitas masukan peserta rapat. Hal ini relevan dengan pengakuan informan bahwa umpan balik guru masih kurang (lihat subbagian 7).

3. Penyelarasan Program dengan Visi dan Misi

Informan menegaskan bahwa meskipun program berbasis kebutuhan sekolah, program tetap mengacu pada visi dan misi. Dengan demikian, kebutuhan berfungsi sebagai pemicu program, sedangkan visi dan misi berfungsi sebagai arah. Pola ini sejalan dengan temuan Winata (2024) mengenai keterkaitan perencanaan program dan pencapaian visi misi sekolah.

4. Keterpaduan Komponen, Sumber Daya, dan Anggaran

Informan menyatakan bahwa dalam setiap program, pertimbangan yang utama adalah dana, disusul sumber daya lainnya, dan seluruh unsur terlibat sebagai bahan pertimbangan. Anggaran harus sesuai juknis dana BOS dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekolah menyusun rencana kegiatan terlebih dahulu, kemudian menindaklanjutinya dalam penganggaran melalui ARKAS ("kita mengikuti ARKAS"). Sesuai ketentuan juknis BOSP terbaru, RKAS memang disusun dalam aplikasi ARKAS (Kemendikdasmen, 2026).

Dalam kacamata pendekatan sistem (Von Bertalanffy, 1968), alur rencana kegiatan lalu penganggaran menunjukkan bahwa program dan pembiayaan saling bergantung. Program yang tidak didukung anggaran sulit dilaksanakan. Pada saat yang sama, posisi dana sebagai pertimbangan utama berarti anggaran bisa menjadi faktor pembatas bagi komponen lain. Perlu dicatat bahwa pernyataan informan tentang pertimbangan kurikulum, peserta didik, pendidik, dan sarana prasarana bersifat umum dan tidak disertai contoh program konkret.

5. Prioritas, Rencana Kerja, dan Pembagian Tugas

Prioritas program ditentukan dalam rapat dengan melihat kebutuhan sekolah serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM). Dalam regulasi sebelumnya, RKJM menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun empat tahun, sedangkan RKT merinci pelaksanaannya per tahun (Kemendiknas, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa penentuan prioritas di sekolah terhubung dengan dokumen perencanaan berjenjang.

Setelah program direncanakan, tugas dan tanggung jawab dibagikan melalui Surat Keputusan (SK) yang merinci siapa mengerjakan apa. Menurut informan, pemahaman peran dijamin karena program didahului rapat dan peran jelas dalam SK. Pembagian tugas tertulis ini memenuhi fungsi pengorganisasian dalam siklus manajemen (Fattah, 2004) dan sejalan dengan temuan Hastuti et al. (2024) tentang struktur tugas dan wewenang dalam MBS.

6. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan oleh kepala sekolah dan unsur pimpinan. Evaluasi berbentuk diskusi kecil yang tidak bersifat formal ("diskusi kecil-kecil"). Untuk program yang melibatkan siswa, sekolah meminta masukan siswa tentang hal yang perlu diperbaiki atau diubah melalui Google Form. Informan membenarkan bahwa hasil evaluasi dipakai sebagai dasar penyusunan program berikutnya, namun proses yang dijelaskan secara rinci baru pada program yang melibatkan siswa.

Jika dibaca dengan siklus PDCA (Deming, 1986), tahap *check* dan *act* sudah ada, tetapi masih bersifat informal. Berdasarkan keterangan informan, tidak ditemukan penjelasan tentang jadwal monitoring atau instrumen baku, dan umpan balik terstruktur baru tampak pada program yang melibatkan siswa. Di sini keterpaduan tampak lebih lemah dibandingkan tahap perencanaan dan penganggaran. Lemahnya monitoring dan evaluasi juga ditemukan di tempat lain. Studi di Kabupaten Soppeng mendapati bahwa supervisi kepala sekolah terhadap guru berada di bawah 50% pada sebagian besar kecamatan, dan pelaporan hasil evaluasi belajar juga rendah di beberapa kecamatan (Torro, 2018).

7. Kendala dan Upaya

Kendala yang disampaikan informan adalah program yang telah disusun tetapi tidak sesuai dengan anggaran. Upaya yang ditempuh adalah mencari dukungan dari alumni dan pihak lain. Keterbatasan sarana prasarana juga ditemukan pada sekolah dasar dan menengah pertama di Kabupaten Soppeng, dengan pemenuhan fasilitas dipandang lebih mudah bila ada kerja sama antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat (Torro, 2018). Hal ini sejalan dengan upaya sekolah menggandeng alumni dan pihak lain. Informan juga menyebut bahwa hal yang perlu ditingkatkan adalah koordinasi seluruh pihak karena guru kadang masih kurang memberikan umpan balik. Dua kendala ini saling terkait: umpan balik guru yang minim pada tahap rapat dapat membuat rencana kurang menangkap kebutuhan dan kemampuan pembiayaan, sehingga ketidaksesuaian baru muncul pada tahap penganggaran. Ini merupakan interpretasi penulis dan perlu dikonfirmasi pada penelitian lanjutan.

8. Ringkasan Temuan dan Analisis Keterpaduan

Tabel 2. Ringkasan Temuan Penelitian

Aspek	Temuan	Ungkapan Informan
Forum perencanaan	Rapat kerja setiap awal tahun ajaran	Dibicarakan di rapat kerja tiap tahun ajaran baru
Dasar penyusunan	Kondisi dan kebutuhan sekolah, evaluasi masalah, visi dan misi	Berbasis kebutuhan tetapi tetap mengacu visi dan misi
Alur penyusunan	Kurikulum menyusun, kepala sekolah menerima ajuan, dirapatkan	Semua berperan memberi saran
Anggaran	Mengikuti juknis dana BOS, disusun melalui ARKAS	"Kita mengikuti ARKAS"
Prioritas	Ditentukan dalam rapat dengan acuan RKT dan RKJM	Mana yang prioritas dan dibutuhkan sekolah
Pembagian tugas	SK yang merinci tugas dan tanggung jawab	Jelas di SK
Monitoring dan evaluasi	Kepala sekolah dan pimpinan; diskusi kecil; Google Form untuk siswa	"Diskusi kecil-kecil"
Kendala dan upaya	Anggaran tidak sesuai rencana; dukungan alumni; koordinasi dan umpan balik guru perlu ditingkatkan	Guru masih kurang memberi umpan balik

Tabel 3. Analisis Keterpaduan Perencanaan Program

Komponen	Bentuk Keterpaduan	Catatan Kritis
Kebutuhan dan visi misi	Kebutuhan sekolah dipadukan dengan visi dan misi	Belum disebut instrumen identifikasi kebutuhan
Pihak terlibat	Masukan dari semua pihak, disatukan kurikulum dan kepala sekolah	Umpan balik guru masih kurang
Anggaran dan sumber daya	Rencana kegiatan ditindaklanjuti ke ARKAS sesuai juknis BOS	Dana menjadi faktor pembatas utama
Pembagian tugas	SK memperjelas peran	Belum ada informasi tentang pemahaman peran di luar SK
Monitoring dan evaluasi	Pimpinan memantau; siswa memberi umpan balik	Masih informal dan baru kuat pada program berbasis siswa

Secara keseluruhan, rangkaian temuan menunjukkan bahwa perencanaan di SMA Negeri 1 Gowa terhubung dari kebutuhan, rapat kerja, visi misi, penganggaran, pembagian tugas, hingga monitoring dan evaluasi. Rangkaian ini sejalan dengan gagasan pendekatan sistem dan siklus manajemen yang memandang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai satu kesatuan (Deming, 1986; Von Bertalanffy, 1968; Hastuti et al., 2024). Keterpaduan paling kuat pada tahap perencanaan, penganggaran, dan pembagian tugas, tetapi masih perlu diperkuat pada monitoring-evaluasi dan kualitas umpan balik.

SIMPULAN

Penerapan pendekatan terpadu dalam perencanaan program di SMA Negeri 1 Gowa tampak dari keterhubungan antara kebutuhan sekolah, rapat kerja yang melibatkan berbagai pihak, kesesuaian dengan visi dan misi, penganggaran melalui ARKAS sesuai juknis BOS, penentuan prioritas berdasarkan RKT dan RKJM, serta pembagian tugas melalui SK. Keterpaduan paling kuat pada tahap perencanaan hingga pembagian tugas, sedangkan monitoring dan evaluasi masih bersifat informal dan baru terstruktur pada

program yang melibatkan siswa. Kendala utama adalah ketidaksesuaian program dengan anggaran serta umpan balik guru yang masih kurang.

Sebagai saran, sekolah dapat membakukan mekanisme monitoring dan evaluasi (jadwal dan instrumen sederhana), memperkuat saluran umpan balik guru sebelum rapat kerja, serta menyelaraskan usulan program dengan plafon anggaran sejak awal pembahasan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak informan (kepala sekolah, guru, komite) dan dokumen pendukung agar temuan lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Deming, W. E. (1986). *Out of the crisis*. Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study.

Fattah, N. (2004). Landasan manajemen pendidikan. Remaja Rosdakarya.

Hastuti, S., Syam, S., & Irawanda, G. (2024). Implementasi manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 33 Makassar. Indonesian Journal of Social and Educational Studies, 5(2). https://doi.org/10.26858/ijses.v5i2.68621

Kemalasari, S. D., Murniati, N. A. N., & Wuryandini, E. (2024). Perencanaan program sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Pekalongan. Jurnal Manajemen Pendidikan, 13(1). https://doi.org/10.26877/jmp.v13i1.16223

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Kementerian Pendidikan Nasional. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Mulyasa, E. (2012). Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi. Remaja Rosdakarya.

Rostini, D., Karyana, K., Alam, R., Rhamdani, N., & Kusmiyati, N. (2023). Manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan di SMA Al-Qona'ah Baleendah Kabupaten Bandung. MUNTAZAM, 4(01), 35–42. https://doi.org/10.35706/muntazam.v4i01.8569

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Torro, S. (2018). Study disparity of minimal standard on basic education in Soppeng South Sulawesi. *Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*, 1064–1066. Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.223

Torro, S., Sunra, L., & Ahmad, M. R. S. (2019). Optimization of teachers' roles in the implementation of child friendly school in the industrial era 4.0. *Proceedings of the International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019)*, 1022–1025. Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.230

Von Bertalanffy, L. (1968). General system theory: Foundations, development, applications. George Braziller.

Winata, I. K. (2024). Pengaruh perencanaan program sekolah terhadap pencapaian visi dan misi di SMAN 2 Mendoyo. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 7(4), 18196–18202. https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.39679